

RINGKASAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS *BOTTOM UP* DI DESA GINTUNGGRANJENG KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

Pemerintahan Desa Gintunggranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon mengambil model pembangunan bottom up, pada prinsipnya untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gintunggranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Pemerintah harus mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Gintunggranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sangat tergantung dari peranan pemerintah dan masyarakat, tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa berbasis bottom up di bidang pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gintunggranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dengan wawancara sehingga mampu menggali lebih dalam tentang perencanaan pembangunan berbasis bottom up. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis bottom up dalam yaitu : 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat, bahwa proses identifikasi masalah di Desa Gintunggranjeng yaitu kegiatan rapat koordinasi belum berjalan dengan efektif, karena masih 60% masyarakat yang hadir dalam Musrenbang Desa. Tetapi semua aspirasi masyarakat dapat ditampung dan didengarkan melalui kegiatan Musrenbang Desa. 2) Partisipatoris, bahwa masyarakat selalu dilibatkan pada setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam mengutarakan usulan, pendapat, ide sudah aktif serta bantuan tenaga/materil yang diberikan masyarakat bersifat sukarela. 3) Sinergitas, bahwa kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Desa sudah cukup efektif dan efisien dengan melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas, menyepakati tim delagasi dan anggaran setiap kegiatan yang diusulkan. Tetapi usulan yang diajukan ke tingkat Kecamatan belum bisa terkamodir sepenuhnya karena banyaknya usulan dari desa atau desa lain.

Kata kunci : Perencanaan Pembangunan, *Bottom Up*

SUMMARY
BOTTOM UP BASED VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING IN
GINTUNGRANGJENG VILLAGE CIWARINGIN DISTRICT CIREBON
REGENCY

The Government of Gintungranjeng Village, Ciwaringin District, Cirebon Regency takes a bottom-up development model, in principle to achieve a more conducive situation or condition to improve the welfare of the people of Gintungranjeng Village, Ciwaringin District, Cirebon Regency. The government must know what the community needs because the successful implementation of the development of Gintungranjeng Village, Ciwaringin District, Cirebon Regency is very dependent on the role of the government and the community, without involving the community, the government will not be able to achieve maximum development results. This study aims to find out how bottom-up-based village development planning is in the field of empowerment in the implementation of development in Gintungranjeng Village, Ciwaringin District, Cirebon Regency. This study uses a qualitative method where data collection by interview is able to dig deeper into bottom-up-based development planning. The object of this research is the village community.

The results of this study indicate 3 (three) processes of implementing bottom-up-based development planning, namely: 1) Focusing on the interests of the community, that the problem identification process in Gintungranjeng Village, namely the coordination meeting activities have not been running effectively, because there are still 60% of the people who attend the Musrenbang Village. However, all community aspirations can be accommodated and heard through Village Musrenbang activities. 2) Participatory, that the community is always involved in every process of development planning activities and community involvement in expressing proposals, opinions, ideas is active and the labor/material assistance provided by the community is voluntary. 3) Synergy, that the agreement between the government and the community in accommodating the aspirations of the community in the Village Musrenbang is quite effective and efficient by making two agreements in choosing priority activities, agreeing on the delegation team and budget for each proposed activity. However, the proposals submitted to the sub-district level have not been fully accommodated due to the large number of proposals from other villages or villages.

Keyword : development planning, bottom up